



Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2303-1573 e-ISSN: 2527-3876
Homepage: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal>
email: jurnalalamwal@syekhnurjati.ac.id

AL-AMWAL

Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran

Pahrul Fauzi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Email: pahrulfauzi@unwiku.ac.id

Syaeful Bakhri

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: sultan01aulia@yahoo.com

Abdul Aziz Ahmad

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman
Email: rekan.aziz@gmail.com

Abstrak

Pariwisata menjadi salah satu sektor andalan pada pembangunan ekonomi Indonesia, hal tersebut dapat diketahui dari munculnya pariwisata sebagai salah satu sektor dari lima besar komoditas penyumbang devisa terbesar nasional. Wisata Pangandaran menjadi semakin berkembang seiring pemekaran wilayah pada tahun 2012. Dengan adanya pemekaran tersebut Kabupaten Pangandaran menjadi lebih fokus mengembangkan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dan penurunan kinerja pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran setelah pemekaran, hal tersebut dapat diketahui dari naik turunnya jumlah pengunjung. Namun disisi lain, setelah pemekaran terdapat beberapa pengoptimalan potensi wisata yang dikembangkan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT, diketahui bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran berada pada posisi kuadran pertumbuhan dengan strategi pertumbuhan yang bersifat stabil. Banyaknya objek wisata potensial dan disahkan menjadi daerah otonom menjadi faktor utama pada sisi kekuatan, sedangkan faktor sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan menjadi titik lemahnya. Adapun pada sisi peluang, Kabupaten Pangandaran dinilai mempunyai peluang yang tinggi karena semakin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia maupun dunia, sedangkan dari sisi ancaman yang perlu diwaspadai adalah kondisi kelestarian alam yang perlu dijaga seiring pembangunan sektor pariwisata. Berdasarkan analisis hierarki proses, pada level pertama ditemukan bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor dengan prioritas pertama dengan nilai 32,68 sedangkan pada posisi kedua yaitu faktor

kelembagaan dengan nilai 29,99. Hal tersebut menandakan bahwa faktor sarana dan prasarana serta kelembagaan menjadi faktor yang perlu diprioritaskan pada pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran. Sedangkan pada level kedua diketahui bahwa lima faktor tertinggi diantaranya peraturan daerah menjadi prioritas pertama disusul oleh kualitas jalan, pengelolaan DTW, Koordinasi dengan masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

Kata Kunci : Pariwisata, Pangandaran, Pemekaran Daerah.

Abstract

Tourism is one of the mainstay sectors in Indonesia's economic development; it can be seen from the emergence of tourism as one of the industries of the five largest national foreign exchange contributor commodities. Pangandaran tourism is becoming increasingly developed along with the expansion of the region in 2012. With the development, Pangandaran Regency has become more focused on developing tourism. Based on the results of the analysis, it can be seen that there are an increase and decrease in performance in the tourism sector in Pangandaran Regency after pemekaran, it can be seen from the ups and downs in the number of visitors. But on the other hand, after pemekaran, there are several optimizing tourism potentials developed. While based on the results of the SWOT analysis, it is known that the tourism sector in Pangandaran Regency is in the position of growth quadrant with a solid growth strategy. The number of potential tourist objects and legalized into autonomous regions is a significant factor in the strength side, while the facilities and infrastructure and management are the weak points. As for the opportunity side, Pangandaran Regency is considered to have high opportunities because of the growing development of the tourism sector in Indonesia and the world, while from the threat side that needs to be watched out is the condition of natural sustainability that needs to be maintained along with the development of the tourism sector. Based on the process hierarchy analysis, at the first level, it was found that facilities and infrastructure were factors with the priority with a value of 32.68 while in the second position were institutional factors with a cost of 29.99. This indicates that the elements of facilities and infrastructure, as well as institutions, are factors that need to be prioritized in the development of the tourism sector in Pangandaran Regency after the expansion. While at the second level it is known that the five highest factors include regional regulations being the priority followed by road quality, DTW management, coordination with the community, and health facilities.

Keywords: Tourism, Pangandaran, Regional Expansion.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di daerah tropis dengan segala potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah Indonesia juga memiliki potensi wisata yang luar biasa, baik berupa wisata alam maupun wisata budaya yang dapat memberikan

kontribusi bagi pembiayaan berupa devisa. Menurut (Yoeti, 2008) pariwisata merupakan salah satu katalisator pembangunan suatu bangsa, selain mampu memberikan kontribusi pembangunan bangsa dengan meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan pajak. Melalui kegiatan kepariwisataan yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat setempat (Ritchi et al., 2018), hal tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pendapatan penduduk sekaligus memperkuat posisi neraca pembayaran yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kartikasari, 2016). Secara teori kunjungan para wisatawan tentunya merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

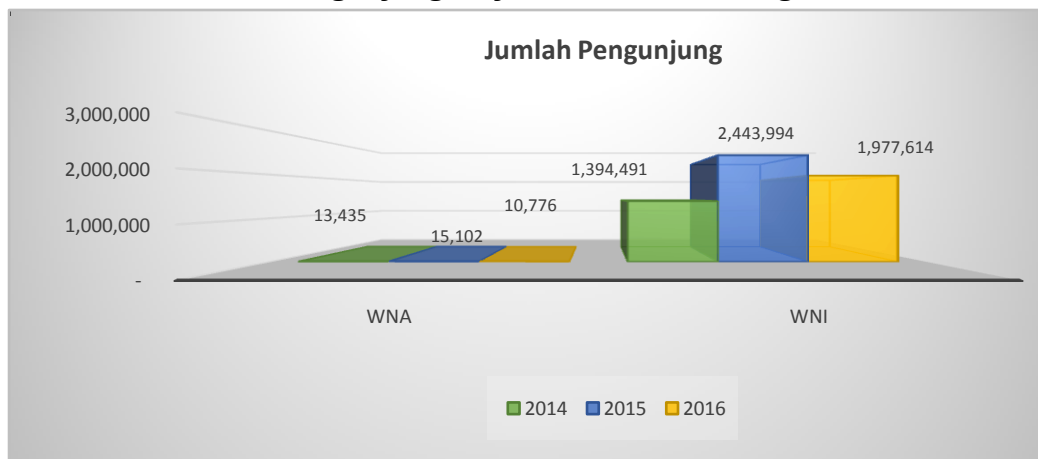
Berdasarkan data Kementrian Pariwisata, baik secara kuantitas kunjungan wisatawan maupun sumbangan devisa yang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata di Indonesia terus meningkat. Bahkan sumbangan devisa sektor pariwisata ini berada pada posisi empat besar setelah minyak, batu bara, dan minyak kelapa sawit. (Suartini & Utama, 2013) juga menambahkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan secara parsial dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Selain itu, dampak sektor pariwisata masih dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sumbangan pajak, maupun tergeraknya sektor perekonomian lain di suatu wilayah yang mempunyai aktivitas wisata.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang cukup serius mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Dari 50 destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan pada rencana induk pembangunan pariwisata nasional tiga diantaranya berada di provinsi Jawa Barat, yaitu; Destinasi Bogor-Halimun, Destinasi Bandung-Ciwidey, dan Destinasi Pangandaran. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 48 tahun 2006, Provinsi Jawa Barat menetapkan rencana induk pengembangan pariwisatanya (RIPPDA Jawa Barat). Wilayah Jawa Barat Selatan, kini menjadi daerah yang mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah (Gumilar, 2005) dan kemudian berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. Salah satu kawasan wisata andalan di Provinsi Jawa Barat adalah area wisata Pangandaran, dimana di kawasan tersebut mempunyai beberapa kawasan pengembangan pariwisata yang cukup potensial. Saat kawasan pangandaran masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Ciamis kontribusi sektor pariwisata sangat kentara. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Ciamis sebagian besar didominasi oleh kawasan Pangandaran. Disebutkan dalam (Sondarika, Ratih, & Suryana, 2017) bahwa Kabupaten Ciamis kehilangan PAD sebesar 85% atau mencapai 6 miliar atas terlepasnya wisata Pangandaran yang kini beralih dan menjadi bagian Kabupaten Pangandaran.

Dengan disahkannya undang-undang no 21 tahun 2012, Kabupaten Pangandaran secara resmi terpisah dari Kabupaten Ciamis untuk secara mandiri berdiri sebagai daerah otonom baru. Disetujuinya Kabupaten Pangandaran sebagai daerah baru oleh pemerintah pusat tentunya memperhatikan kemampuan dari kemandirian daerah untuk berdiri, salah satunya dari sisi ekonomi dan pembiayaan daerah. (Kuncoro, 2012) memberikan pendapat bahwa di setiap pemekaran suatu daerah mempunyai alasan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, karena kecenderungan yang seringkali terjadi adalah sumber daya yang ditarik ke daerah induk sehingga daerah yang jauh dari pusat kekuasaan cenderung mengalami ketertinggalan. Setiap pemekaran akan membawa adanya keterlibatan yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti halnya pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal (Muqoyyidin, 2013).

Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari sektor pariwisata bagi Kabupaten Ciamis yang saat ini menjadi kabupaten induk. Pasca adanya pemekaran, sektor pariwisata dalam hal peningkatan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik (nasional) di Kabupaten Pangandaran menunjukkan kinerja yang fluktuatif, hal tersebut dijelaskan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Pengunjung Objek Wisata Kab. Pangandaran



Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, 2018

Sebagaimana Gambar 1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 total pengunjung objek wisata Kabupaten Pangandaran mencapai 1.407.926 orang, dengan jumlah pengunjung asal WNA sebanyak 13.435 orang dan WNI sebanyak 1.394.491 orang. Kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebanyak 2.459.096 orang. Adapun pada tahun 2016 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 1.988.390 orang, yakni diantaranya 10.776 orang berasal dari WNA dan 1.977.614 orang berasal dari WNI (BPS Kabupaten Pangandaran, 2018). Setelah berdiri sendiri sebagai daerah baru, Kabupaten Pangandaran tentunya memerlukan pengembangan perencanaan terutama dalam mengoptimalkan sektor-sektor potensial untuk terus dikembangkan sebagai salah satu sumber yang bisa memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan daerahnya. Maka pada penelitian ini, penulis merasa penting untuk mengetahui sejauh mana potensi sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu sektor potensial penghasil pendapatan asli daerah.

Penelitian tentang sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran memang bukan sesuatu hal yang baru, namun sejauh ini nampaknya belum ditemukan topik yang secara spesifik mengenai pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran pasca adanya pemekaran pada Tahun 2012. Penelusuran terkait penelitian terdahulu dinilai perlu sebagai upaya dalam menunjukkan fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud diantaranya seperti *pertama*, (Sondarika et al., 2017). Fokus penelitian ini adalah dampak pemekaran Kabupaten Pangandaran terhadap potensi budaya dan pariwisata alam Kabupaten Ciamis. Dalam tulisannya dikatakan, adanya pemekaran Kabupaten Pangandaran berdampak pada hilangnya PAD Kabupaten Ciamis yang mencapai 85%. *Kedua*, (Triana, 2018). Fokus kajiannya adalah meliputi strategi implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, strategi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara efektif, hal

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor namun secara keseluruhan adalah disebabkan karena kurangnya koordinasi antar elemen yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, baik elemen pemerintahan, para stakeholders, dan juga masyarakat sekitar. Adapun strategi yang dapat digunakan adalah melalui strategi *collaborative governance*. Ketiga, (Mutakalliman, 2014). Fokus penelitiannya adalah mengenai Pangandaran sebagai Kabupaten Baru yang dinilai berdasarkan perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pemekaran belum sepenuhnya memberikan kemashlahatan yang bertujuan untuk menjaga aspek primer maupun sekunder sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keempat, (Hidayat, 2011). Fokus penelitiannya adalah pada strategi perencanaan dan pengembangan objek wisata Pantai Pangandaran sebelum adanya pemekaran pada Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, kerusakan sarana dan prasarana cukup kompleks karena pantai Pangandaran saat itu tengah berada pada fase stagnasi terkait siklus daur hidup objek wisata. Adapun strategi perencanaan dan pengembangan yang dapat digunakan adalah dengan optimalisasi persiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan wisata bahari.

Fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terkait pembangunan sektor pariwisata pasca adanya pemekaran pada tahun 2012. Dengan meneliti daya tarik dan kinerja Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran, yang didukung oleh penggunaan alat analisis SWOT dan AHP. Selain nantinya akan tergambar kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman dalam pengembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Pangandaran, diharapkan penelitian ini juga akan mengungkapkan kebijakan yang perlu diutamakan sesuai skala prioritas untuk pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran secara optimal. Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda diantara penelitian sebelumnya.

LITERATUR REVIEW

Profil Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Kota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Parigi dan memiliki Luas wilayah yaitu 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha. Kabupaten Pangandaran memiliki panjang pantai 91 Km. Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 21 tahun 2012, disebutkan bahwa Kabupaten Pangandaran kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Ciamis, yang terdiri atas 10 kecamatan yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih (Budiawan, 2018). Potensi yang dimiliki Kabupaten bungsu di Jawa Barat ini antara lain; pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan yang paling terbesar adalah pariwisata.

Terbentuknya Kabupaten Pangandaran menjadi Kabupaten baru di Jawa Barat menjadikannya kota wisata yang terpisah dari Kabupaten Ciamis (P, 2018). Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai kawasan berpotensi wisata, disebut demikian karena Kabupaten Pangandaran memiliki banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : pantai pangandaran, taman wisata alam (cagar alam pananjung), pantai batu hiu,

pantai batu karas, pantai madasari, pantai karapyak, dan wisata sungai yaitu cukang taneuh (green canyon), citumang, santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi dan cukup lengkap, juga tersedia restoran dan tempat hiburan lainnya (Diskominfo Kabupaten Pangandaran, 2017).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut prakasa serta aspirasinya dengan menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut (Nurjaman, 2018). Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Sunarno, 2005) dalam tulisannya yang mengungkapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberadaan otonomi daerah tersebut bertujuan untuk memacu adanya pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya guna upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam (Afandi, 2013) dikatakan bahwa pembentukan daerah otonom dapat didasarkan oleh adanya tuntutan berupa tuntutan hukum mengingat Indonesia yang merupakan negara hukum, tuntutan negara kesejahteraan yang dituntut dalam pancasila dan UUD 1945, tuntutan demokrasi sebagai perluasan kesempatan partisipasi rakyat, serta tuntutan kebhinekaan berupa keberagaman akan sifat dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pemekaran Daerah

Menurut (Makagansa, 2008) istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asal yaitu “mekar”. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berkembang menjadi terbuka, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, menjadi besar dan gembung, mulai timbul dan berkembang. Dijelaskan dalam (Hamri, Intan, Putri, Siregar, & Bratakusumah, 2016) bahwa pemekaran wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah, yaitu pengelolaan ukuran, bentuk, dan hierarki satuan pemerintah daerah yang bermaksud untuk mencapai atau melaksanakan tujuan administrasi dan politik. Proses penataan daerah disini umumnya mencakup pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah.

Persyaratan dalam pemekaran daerah otonom kabupaten sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait Pembentukan Daerah, dikatakan pada dasarnya Pembentukan Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta dipergunakan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan daerah menurut (Lumika, 2014) adalah potensi daerah, kemampuan ekonomi, luas wilayah, kependudukan, sistem keamanan dan pertahanan, serta pertimbangan dari berbagai aspek seperti halnya soal politik, soal budaya, social ekonomi yang memungkinkan daerah tersebut dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan atas dibentuknya daerah sekaligus diberikannya otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut (Halim, 2007) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber PAD diantaranya; (1). Pajak daerah, yaitu menurut (Sjafrizal, 2014) merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2). Retribusi daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (3). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Terbentuknya pemerintahan daerah baru disebabkan oleh beberapa hal, antara lain menurut (Tri, 2009) adalah karena adanya motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya ketertinggalan dalam pembangunan; Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban rural, tingkat pendapatan). Beberapa pemekaran daerah lebih didasari motif ingin lepas dari himpitan “penindasan” kelompok lain atas dasar etnis, agama, dan lain-lain; Adanya kemandirian fiskal yang dijamin UU dengan disediakannya DAU, DAK, Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam dan disediakannya sumber-sumber pendapatan daerah; serta motif pemburu rente dari para elite. Pemekaran daerah banyak didasari motif karena ingin menjabat di Birokrasi Lokal dan DPRD. Selain itu, pemekaran daerah juga didasari motif untuk membangun kembali sejarah dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa lalu.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan harapan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, peristiwa maupun keadaan yang bersifat mengungkap fakta (fact finding). Adapun pendekatan kualitatif yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Penelitian ini membutuhkan data primer dengan metode pengambilan data melalui wawancara menggunakan kuesioner. Responden dibagi dua jenis yaitu responden umum atau pengunjung kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran (sebagai populasi yang diambil sampel), dan responden khusus yang dianggap memiliki pengetahuan penuh mengenai pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Responden yang merupakan pengunjung di beberapa kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran tidak diketahui jumlah total populasinya, oleh karena itu untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus sebagaimana berikut (Husein, 1997):

$$n = \left[\frac{z \cdot 1/2.0,05}{0.20} \right]^2$$

$$n = \left[\frac{1,96}{0.20} \right]^2$$

$$n = 96,4$$

Keterangan:

Standar Error = 0,20

$\alpha = 0.05$

$Z \frac{1}{2} =$ tabel distribusi normal sampel

Dari rumus tersebut diatas didapat ukuran sampel sebanyak 96,4 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Adapun secara terperinci responden khusus tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sampel Responden Khusus

No	Responden	Ukuran sampel
1	Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Pangandaran	2
2	Bidang Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Pangandaran	3
3	Komunitas masyarakat/swasta peduli pariwisata	2
4	Bappeda Kabupaten Pangandaran	1
5	Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran	1
6	Dinas Pekerjaan Umum (Rencana Tata Kota)	1
Jumlah		9

Sumber: Data primer diolah, 2019

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer tersebut berupa penilaian responden terkait faktor-faktor yang menjadi potensi utama daya tarik pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang diperoleh dari responden umum. Adapun dari responden khusus diperoleh data terkait faktor-faktor apa saja yang menjadi unsur penting dalam pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi data yang diperoleh dari BPS, referensi jurnal serta berbagai sumber lainnya yang berkaitan dan melengkapi penelitian ini. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Teknik Pengamatan atau observasi meliputi berbagai hal yang menyangkut pengamatan kondisi fisik dan aktivitas pada lokasi penelitian.
2. Teknik kuesioner adalah bentuk pertanyaan terstruktur yang diberikan kepada responden sesuai dengan masalah penelitian. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu menemui calon responden yang datang ke beberapa objek wisata di Kabupaten Pangandaran dan dilakukan proses wawancara dengan pertimbangan karena populasi yang bervariasi, berbeda karakter dan bersifat heterogen.
3. Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengkajian beberapa informasi dari terbitan berkala, buku-buku, literatur dokumen, foto-foto, surat kabar, media elektronik, dan referensi statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang terlihat pada Tabel 2 berikut, diketahui bahwa daya tarik utama sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran adalah wisata bahari dan wisata alam, adapun faktor penarik lain seperti wisata budaya dan wisata kuliner masih belum mampu menjadi pendamping daya tarik utama tersebut.

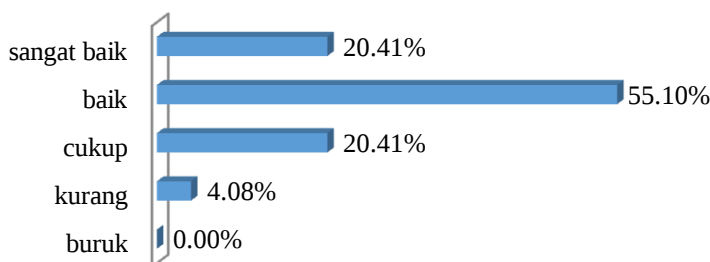
Tabel 2. Daya tarik sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran

Kriteria Penilaian	Wisata Bahari	Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Kuliner
Tidak Menarik	0,00%	0,00%	0,00%	6%
Kurang Menarik	0,00%	0,00%	21%	45%
Cukup	19%	22%	48%	27%
Menarik	61%	60%	18%	16%
Sangat Menarik	20%	18%	13%	6%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Adapun penilaian responden mengenai pengelolaan sektor pariwisata secara umum di Kabupaten Pangandaran masih dinilai dengan skor rata-rata yang artinya belum mencapai kata memuaskan tetapi juga tidak mengecewakan. Hal tersebut tercermin dari 59% responden yang menilai cukup untuk pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran.

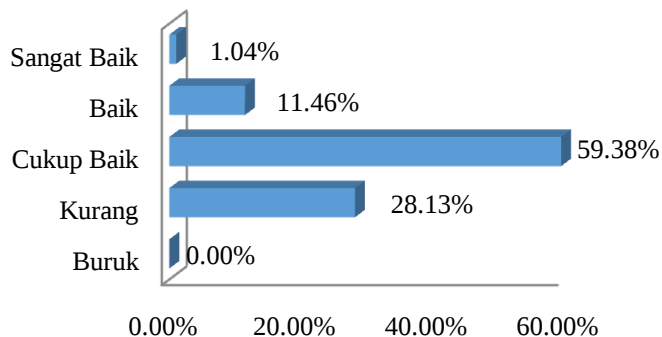
Gambar 2. Penilaian Responden Terhadap Pengelolaan Wisata Pangandaran



Sumber: Data primer diolah, 2019

Penilaian responden terhadap akses informasi terkait kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran yang dinilai mudah diakses terutama dengan media internet menjadi faktor pendukung para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Begitu pula aspek keamanan dan keselamatan (safe) berwisata menjadi suatu hal penting, responden menilai bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran sudah dapat dikatakan baik.

Gambar 3. Penilaian Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisata Pangandaran



Sumber: Data primer diolah, 2019

Penilaian responden mengenai fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Pangandaran secara umum sudah cukup baik. Kondisi jalan, fasilitas umum, ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan dan beberapa faktor penunjang lain dinilai sudah cukup memadai meski harus tetap ditingkatkan demi terus memenuhi kepuasan pengunjung. Jika dilihat dari sisi fasilitas akomodasi yaitu perhotelan, sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran dinilai sudah cukup baik karena menawarkan fasilitas yang lengkap mulai dari homestay, hotel melati, hingga hotel berbintang tiga sudah dapat ditemui, begitu pula dari sisi fasilitas restoran yang responden nilai sudah cukup baik.

Analisis SWOT digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran dan untuk hal tersebut dapat dilakukan melalui kajian literatur, wawancara ataupun riset eksploratif (Rangkuti, 2008). Sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui indikator-indikator dari faktor internal dan eksternal dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang kompeten yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan mengenai indikator-indikator pariwisata Kabupaten Pangandaran baik dari faktor internal maupun eksternal yaitu:

Tabel 3. Indikator Analisis SWOT Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran

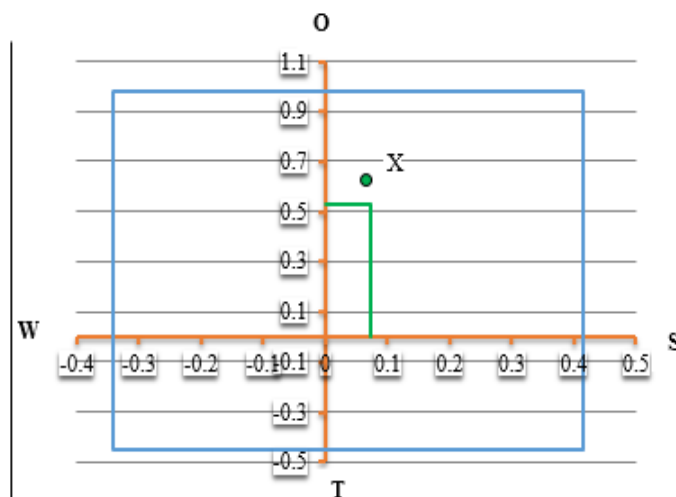
Faktor Internal			
Kekuatan		Kelemahan	
1. Banyaknya SDA Potensial untuk dikembangkan sebagai daerah wisata		1. Beberapa lokasi wisata belum melakukan manajemen secara profesional.	
2. Sudah memiliki citra sebagai daerah unggulan pariwisata alam		2. Sarana dan prasarana (pendukung) belum lengkap tersedia.	
3. Menjadi salah satu daerah wisata unggulan pemerintah provinsi jawa barat		3. Ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan beberapa lokasi wisata di Kabupaten Pangandaran belum begitu baik.	
4. Memiliki letak geografis dan kontur wilayah yang potensial untuk dijadikan daerah dengan pariwisata sebagai sektor unggulan.		4. Upaya promosi belum dilakukan secara baik dan menarik.	
5. Dengan disahkannya menjadi Kabupaten Baru, kabupaten pangandaran memiliki wewenang penuh untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di wilayahnya.		5. Pengemasan kegiatan-kegiatan wisata yang ditawarkan belum begitu baik dan kurang bervariasi (terutama dari daya tarik selain wisata alam).	
6. Dukungan dana menjadi semakin kuat setelah Kabupaten Pangadaran disahkan menjadi daerah otonomi baru.		6. Belum kuatnya sistem pemerintahan mengakibatkan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum begitu baik.	
		7. Kurangnya jumlah SDM yang berkualitas mumpuni untuk mengembangkan sektor pariwisata kab. Pangandaran baik dari pihak swasta maupun pemerintah.	
Faktor Eksternal			
Peluang		Ancaman	
1. Jumlah wisatawan (pelancong) semakin meningkat setiap tahunnya.		1. Rusaknya kondisi alam dengan dijadikannya lokasi-lokasi wisata	
2. Persaingan antar negara asean dengan diberlakukannya (MEA) menjadi peluang tersendiri bagi sektor pariwisata nasional		2. Kondisi sosial kemasyarakatan di lokasi wisata pantai pangandaran yang sudah banyak terdapat LSM	

- | | |
|--|--|
| termasuk Pangandaran. | 3. Kondisi politik dan keamanan nasional yang kadang berubah-ubah dapat mempengaruhi kinerja sektor pariwisata termasuk di Kabupaten Pangandaran |
| 3. Masih terdapatnya beberapa lokasi potensial yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata. | |
| 4. Pengelolaan sektor pariwisata dapat lebih fokus karena dikelola sendiri seiring pemekaran yang sudah dilakukan. | |

Sumber: Data primer diolah, 2019

Setelah diperoleh Indikator masing-masing aspek pada Analisis SWOT maka disarikan ke dalam instrumen kuesioner penelitian. Pembobotan pada setiap indikator menggunakan penilaian skala 1 s/d 6 dimana angka 1 berarti sangat tidak baik sedangkan angka 6 berarti sangat baik. Berdasarkan pada kedua hasil analisis pada faktor Internal dan Eksternal dapat diketahui posisi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran menggunakan Model Posisi Perkembangan Pariwisata. Pada faktor internal diketahui bahwa nilai dari selisih antara kekuatan dan kelemahan adalah sebesar 0,07269, sedangkan pada faktor eksternal diketahui selisih nilai antara peluang dan ancaman adalah sebesar 0,53008. Maka berdasarkan model seperti yang dijelaskan pada Gambar 4.

Gambar 4. Posisi Perkembangan Pariwisata Kabupaten Pangandaran



Sumber: Data primer diolah, 2019

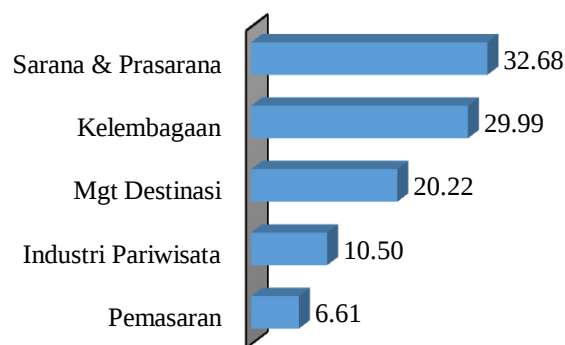
Seperti yang terlihat bahwa Gambar 4 terdiri dari dua sumbu yang saling berpotongan yaitu sumbu mendatar (absis) dan sumbu vertikal (ordinat) yang setiap sumbu mempunyai dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Pada sumbu mendatar sisi positif adalah faktor kekuatan (strength) yang dilambangkan dengan huruf S, sedang pada sisi absis negatifnya adalah faktor kelemahan (weakness) yang dilambangkan dengan huruf W. Untuk sumbu vertikal (ordinat) pada sisi positif yaitu faktor peluang (opportunity) dan pada sisi negatif yaitu faktor ancaman (threat). Garis biru yang membentuk persegi merupakan area dari skoring analisis SWOT pariwisata Kabupaten Pangandaran, sedangkan sumbu X merupakan perpotongan selisih antara faktor internal dan eksternal yang sekaligus merupakan sebagai posisi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran. Posisi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran berdasarkan analisis SWOT yang ditunjukkan oleh titik X pada Gambar 4

mempunyai makna bahwa posisi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran berada pada kuadran I dimana kuadran I digolongkan sebagai kuadran pertumbuhan (growth), maka titik pengembangan sektor pariwisata kabupaten pangandaran seperti yang ditunjukkan pada gambar oleh titik X maka strategi pengembangan yang dapat digunakan adalah menggunakan s Tabel *growth strategy* atau strategi pertumbuhan stabil.

Dengan analisis SWOT dapat diinformasikan ada korelasi penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2016 yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan potensi yang menjadi kekuatan untuk mengurangi kelemahan di sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran. Satu sisi Kabupaten Pangandaran menjadi daerah otonom adalah suatu kekuatan dan peluang. Namun di sisi lain, hal tersebut nampaknya belum dapat diimbangi dengan Sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mengembangkan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Setelah dilakukan beberapa analisis seperti yang dibahas di atas, untuk mengetahui hierarki prioritas kebijakan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran dilakukan Analisis Hierarki Proses (AHP). Analisis ini menjadi penting agar mampu memetakan pada pelaksanaan kebijakan yang harus diambil dalam pengembangan kebijakan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Kriteria dan indikator yang digunakan seperti yang telah dijelaskan pada Gambar 5. mengacu pada UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan beberapa buku literatur. Adapun hasil perhitungan analisis hierarki proses pada level pertama seperti dijelaskan pada Gambar 5 berikut ini:

Gambar 5. Hasil Perhitungan AHP Level Pertama



Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan Gambar 5 yang merupakan hasil analisis pada level pertama diketahui bahwa sarana & prasarana menjadi faktor pada prioritas pertama dengan persentase sebesar 32,68. Hal tersebut memberikan arti bahwa pembangunan sarana & prasarana menjadi hal pertama yang paling penting untuk dibenahi. Sebagai kabupaten yang baru saja dimekarkan Kabupaten Pangandaran tentunya membutuhkan banyak pengembangan sarana & prasarana sebagai penunjang seluruh kegiatan terutama kegiatan pariwisata yang menjadi sektor andalan di kabupaten ini.

Prioritas kebijakan yang menempati posisi kedua adalah faktor kelembagaan dengan persentase sebesar 29,99. Tidak hanya di Kabupaten Pangandaran, hampir di

setiap daerah yang dilakukan pemekaran persoalan kelembagaan menjadi tantangan pertama yang perlu dibenahi, selain masih kekurangan sumber daya manusia sistem pengelolaannya pun belum stabil. Sedangkan faktor yang menempati posisi ketiga adalah manajemen destinasi wisata dengan persentase sebesar 20,22 disusul oleh faktor industri pariwisata dengan nilai persentase 10,50 dan faktor pemasaran sebesar 6,61 persen.

Pada Tabel 4 dijelaskan hasil perhitungan analisis hierarki proses (AHP) pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran pada level kedua dari faktor sarana dan prasarana yang terdiri dari lima indikator. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui indikator kualitas jalan menjadi prioritas pertama pada faktor sarana & prasarana dengan persentase sebesar 31,09. Pada prioritas kedua yaitu indikator fasilitas kesehatan dengan persentase mencapai 22,34. Sedangkan pada prioritas ketiga dan keempat yaitu fasilitas telekomunikasi dan transportasi dengan persentase 16,42 dan 16,00, sedangkan pada prioritas ke lima yaitu fasilitas terminal dengan persentase 14,15.

**Tabel 4. Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua
Faktor Sarana & Prasarana**

Indikator	Persentase	Prioritas
Kualitas Jalan	31,09	1
Transportasi	16,00	4
Fasilitas Kesehatan	22,34	2
Terminal	14,15	5
Telekomunikasi	16,42	3

Sumber: Data primer diolah, 2019

Selanjutnya pada Tabel 5 dijelaskan mengenai hasil analisis pada level kedua untuk faktor industri pariwisata. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada faktor industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran indikator yang menjadi prioritas pertama adalah industri kreatif dengan nilai persentase mencapai 29,07. Adapun indikator pada prioritas kedua dan ketiga yaitu pasar/pertokoan dan jasa wisata dengan nilai persentase mencapai 20,33 dan 19,00. Sedangkan pada prioritas keempat dan kelima yaitu perhotelan dan restoran dengan nilai persentase mencapai 17,91 dan 13,69.

**Tabel 5. Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua
Faktor Industri Pariwisata**

Indikator	Persentase	Prioritas
Perhotelan	17,91	4
Restoran	13,69	5
Pasar/Pertokoan	20,33	2
Jasa Wisata	19,00	3
Industri Kreatif	29,07	1

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pada Tabel 6 dijelaskan mengenai hasil analisis pada level kedua untuk faktor manajemen pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada faktor manajemen pariwisata di Kabupaten Pangandaran indikator yang menjadi prioritas pertama adalah pengelolaan DTW (daerah tujuan

wisata) dengan nilai persentase mencapai 44,88. Adapun indikator pada prioritas kedua dan ketiga yaitu partisipasi masyarakat dan pusat informasi wisata dengan nilai persentase mencapai 33,64 dan 21,48.

Tabel 6. Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Manajemen Pariwisata

Indikator	Persentase	Prioritas
Pusat Informasi	21,48	3
Pengelolaan DTW	44,88	1
Partisipasi Masyarakat	33,64	2

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berikutnya pada Tabel 7 dijelaskan mengenai hasil analisis pada level kedua untuk faktor pemasaran pariwisata. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada faktor pemasaran pariwisata di Kabupaten Pangandaran indikator yang menjadi prioritas pertama adalah pengelolaan kegiatan dengan nilai persentase mencapai 47,83. Adapun indikator pada prioritas kedua dan ketiga yaitu branding DTW dan website resmi dengan nilai persentase mencapai 29,21 dan 22,96.

Tabel 7. Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Pemasaran

Indikator	Persentase	Prioritas
Website Resmi	22,96	3
Pengelolaan Kegiatan	47,83	1
Branding DTW	29,21	2

Sumber: Data primer diolah, 2019

Faktor terakhir pada level dua dijelaskan pada Tabel 8 yaitu faktor Kelembagaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada faktor Kelembagaan di Kabupaten Pangandaran indikator yang menjadi prioritas pertama adalah peraturan daerah dengan nilai persentase mencapai 51,86. Adapun indikator pada prioritas kedua dan ketiga yaitu koordinasi dengan masyarakat dan LSM/organisasi kemasyarakatan dengan nilai persentase mencapai 28,89 dan 19,25. Hasil perhitungan pada tabel 8 tersebut menguatkan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Edi Kusnandi selaku Kabid Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata & Perindagkop Kabupaten Pangandaran yang mengatakan:

“di pangandaran mah tos loba teuing LSM nu ngaku peduli Pangandaran tapi nyatana mah tetep mentingkeun golonganna”

Yang artinya bahwa di kawasan pantai Pangandaran khususnya sudah banyak terdapat LSM atau organisasi masyarakat yang menyatakan peduli terhadap pangandaran tetapi pada nyatanya hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu koordinasi masyarakat dan pembinaan LSM atau organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata Kabupaten Pangandaran perlu di atur dan ditata sedemikian rapi sehingga dapat bersama-sama dengan masyarakat dan seluruh pihak yang terkait untuk membangun pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang ber-kesinambungan.

Tabel 8. Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Kelembagaan

Indikator	Persentase	Prioritas
Peraturan Daerah	51,86	1
LSM/Org Pariwisata	19,25	3
Koordinasi Masyarakat	28,89	2

Sumber: Data primer diolah, 2019

Secara keseluruhan hasil analisis hierarki proses (AHP) pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran dapat dilihat pada Tabel 9. Dimana pada kolom pertama merupakan rangkuman perhitungan pada analisis level pertama atau kriteria. Sedangkan pada kolom kedua merupakan rangkuman hasil dari perhitungan pada analisis level kedua. Pada kolom kedua dihitung prioritas dengan keseluruhan indikator, dan secara keseluruhan prioritas pertama pada level kedua adalah indikator peraturan daerah disusul pada prioritas kedua yaitu indikator kualitas jalan. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Analisis Hierarki Proses Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran

Level Pertama (Kriteria)			Level Kedua (Indikator)		
Faktor	Bobot (%)	Prioritas	Indikator	Bobot (%)	Prioritas
Sarana dan Prasarana	32,68	P1	Kualitas Jalan	10,16	P2
			Transportasi	5,23	P9
			Fasilitas Kesehatan	7,30	P5
			Terminal	4,62	P10
			Telekomunikasi	5,37	P8
Industri Pariwisata	10,50	P4	Perhotelan	1,88	P17
			Restoran	1,44	P19
			Pasar/Pertokoan	2,14	P14
			Jasa Wisata	2,00	P15
			Industri Kreatif	3,05	P13
Manajemen Pariwisata	20,22	P3	Pusat Informasi	4,34	P11
			Pengelolaan DTW	9,08	P3
			Partisipasi Masyarakat	6,80	P6
Pemasaran	6,61	P5	Website Resmi	1,52	P18
			Pengelolaan Kegiatan	3,16	P12
			Branding DTW	1,93	P16
Kelembagaan	29,99	P2	Peraturan Daerah	15,55	P1
			LSM/Org Pariwisata	5,77	P7
			Koordinasi Masyarakat	8,66	P4
Jumlah				100,00	

Sumber: Data primer diolah, 2019

Analisis hierarki proses (AHP) yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga level, namun hasil yang penulis tampilkan pada bagian analisis diatas hanya sampai pada level dua saja, hal tersebut dikarenakan data yang penulis dapat pada saat proses wawancara di lapangan tidak memungkinkan untuk menampilkan hasil pada level ketiga. Seperti diketahui pada level ketiga merupakan arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Pangandaran, apakah arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran kedepan lebih condong ke arah pembangunan eko wisata, kepariwisataan berbasis masyarakat, atau kebijakan *Pro Poor Tourism*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja sektor pariwisata setelah Kabupaten Pangandaran resmi berdiri menunjukkan fluktuatif. Meskipun begitu, setelah pemekaran Kabupaten Pangandaran sudah fokus melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana penunjang pariwisata serta mulai mengembangkan dan mengelola objek-objek wisata potensial.
2. Faktor banyaknya sumberdaya alam potensial wisata dan sudah disahkan menjadi daerah otonomi baru, menjadi faktor kekuatan utama Kabupaten Pangandaran pada hasil Analisis SWOT Pariwisata Faktor Internal. Sedangkan dari sisi kelemahan, faktor sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan lokasi wisata menjadi titik lemah. Pada sisi peluang (opportunity) sektor pariwisata mempunyai harapan yang baik, hal tersebut tercermin dari nilai bobot yang tinggi pada hasil analisis. Adapun pada sisi ancaman yang perlu diperhatikan pada pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran adalah dari sisi efek negatif kegiatan pariwisata terhadap kelestarian alam.
3. Berdasarkan hasil analisis hierarki proses (AHP) pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran diketahui pada level pertama, faktor sarana prasarana menjadi prioritas pertama disusul oleh faktor kelembagaan, manajemen destinasi wisata, industri pariwisata dan pemasaran. Adapun pada level kedua hasil analisis hierarki proses diketahui bahwa lima faktor tertinggi diantaranya peraturan daerah menjadi prioritas pertama disusul oleh kualitas jalan, pengelolaan DTW, Koordinasi dengan masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N. (2013). Peluang Dan Tantangan pembangunan Daerah Otonom Baru Di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2), 275–296.
- BPS Kabupaten Pangandaran. (2018). *Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2018*. Kabupaten Pangandaran.
- Budiawan, A. (2018). Analisa Skenario Planning Kebijakan Publik Rt/Rw Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 12–25.
- Diskominfo Kabupaten Pangandaran. (2017). Selayang Pandang Kabupaten Pangandaran. Retrieved from <http://web.pangandarankab.go.id>.

- Gumilar, I. (2005). Jawa Barat Selatan Economic Valuation Of Marine Resources In Southern. *Creative Research Journal*, 1, 1–15.
- Halim, A. (2007). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Hamri, E., Intan, E., Putri, K., Siregar, H. J., & Bratakusumah, D. S. (2016). Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 7(1), 111–125.
- Hidayat, M. (2011). Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat) Bandung. *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, I(1), 33–44.
- Husein, U. (1997). *Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartikasari, R. (2016). Potensi Pengembangan Ekowisata di Green Canyon Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu- Ilmu Pertanian "AGRIKA,"*10, 41–54.
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal Kota dan Kawasan?* Jakarta: Salemba Empat.
- Lumika, E. J. (2014). Persyarakatan Pemekaran Suatu Daerah Otonomi Kabupaten. *Jurnal Lex Administratum*, II(2), 15–25.
- Makagansa, H. . (2008). *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Fuspend.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia : Konsep , Fakta Empiris dan. *Jurnal Konstitusi*, 10(22).
- Mutakalliman. (2014). *Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru Dalam Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/12959>
- Nurjaman, D. (2018). *Pembentukan daerah otonom baru dihubungkan dengan PP. NO. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah: Studi tentang rencana pembentukan Kabupaten Jampang*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/10717/>
- P, D. P. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4, 64–76.
- Rangkuti, F. (2008). *Analisis SWOT Membedah Kasus Bisnis (Tujuh Bela)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ritchi, H., Zulkarnaen, R. M., Dewantara, Z., Akuntansi, D., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Upaya Peningkatan Aksesibilitas UKM (Desa Wisata) Kepada Pasar Di Lokasi Wisata Pangandaran Dan Sekitarnya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 36–40.

- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sondarika, W., Ratih, D., & Suryana, A. (2017). Wulan Sondarika. *Jurnal Artefak*, 4, 35–46.
- Suartini, N. N., & Utama, M. S. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 175–189.
- Sunarno, S. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri, R. (2009). *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Triana, Y. (2018). Strategi Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Institutional Repositories & Sciencific Journals*. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/32473/>
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan Pembangunan Pariwisata*. Jakarta: Penebar Swadaya.